

TANGGUNG JAWAB TERHADAP BARANG KADALUARSA YANG DIPERDAGANGKAN DALAM BISNIS FRANCHISE

VINCENTIUS ERICK MERE

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan hukum terhadap barang/makanan kadaluarsa yang diperdagangkan dalam bisnis *franchise* serta menjelaskan dan mendeskripsikan tentang faktor penyebab adanya bahan makanan kadaluarsa serta solusi yang diberikan terhadap barang/makanan kadaluarsa dalam bisnis *franchise* bagi perlindungan konsumen. Teori yang digunakan adalah teori perjanjian sebagaimana diungkapkan oleh Subekti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian ini dirumuskan Pengaturan hukum terhadap barang/makanan kadaluarsa yang diperdagangkan dalam bisnis *franchise*, terutama yang dilakukan oleh pelaku usaha dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan kepentingan konsumen telah dilindungi oleh Undang-undang baik itu proses gugatan dan mekanismenya baik gugatan itu dilakukan melalui litigasi atau non litigasi. Upaya hukum terhadap kasus yang menimpa restoran cepat saji Pizza Hut dan Marugame Udon menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dimana disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Faktor yang menyebabkan adanya bahan makanan kadaluarsa adalah lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha dalam bisnis waralaba, serta terdapat faktor dimana konsumen enggan membela atau memperjuangkan haknya atas adanya kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari adanya bahan makanan kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan konsumen atau disebabkan karena konsumen itu sendiri yang malas untuk berperkara baik melalui litigasi maupun non litigasi. Oleh karena itu UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan LPKSM untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan.

Kata kunci : Sengketa Konsumen

RESPONSIBILITY FOR SUBSIDIARIES MERCHANTABILITY IN FRANCHISE BUSINESS

VINCENTIUS ERICK MERE

ABSTRACT

This research is conducted to know and explain about the legal arrangement of expired goods / food traded in the franchise business and to explain and describe the causal factors of expired food as well as solutions given to goods / food expired in the franchise business for consumer protection. The theory used is the covenant theory as revealed by Subekti. The research method used is normative legal research, namely research law literature or legal research based on secondary data. The results of this study formulated the legal arrangement of goods / expired food traded in the franchise business, especially those conducted by business actors seen from the provisions of the Consumer Protection Act can be said consumer interests have been protected by law both the lawsuit process and the good mechanism of the lawsuit conducted through litigation or non litigation. Legal efforts against cases that hit Pizza Hut and Marugame Udon fast food restaurants under the consumer protection law can be done in 2 ways: consumer dispute resolution through court and out-of-court consumer dispute settlement. As provided for in Article 45 paragraph (2) where it is mentioned that consumer dispute resolution can be pursued through court or out of court based on the voluntary choice of the disputing parties. Factors that cause the existence of food expired is the weakness of government control over business actors in the franchise business, and there are factors where consumers are reluctant to defend or fight for their rights to the loss suffered by consumers as a result of the existence of food expired. This is due to the ignorance of consumers or caused by consumers themselves who are lazy to litigation either through litigation or non litigation. Therefore UUPK is intended to be a strong legal foundation for the government and LPKSM to conduct consumer empowerment through coaching and education.